

BAB I PENDAHULUAN

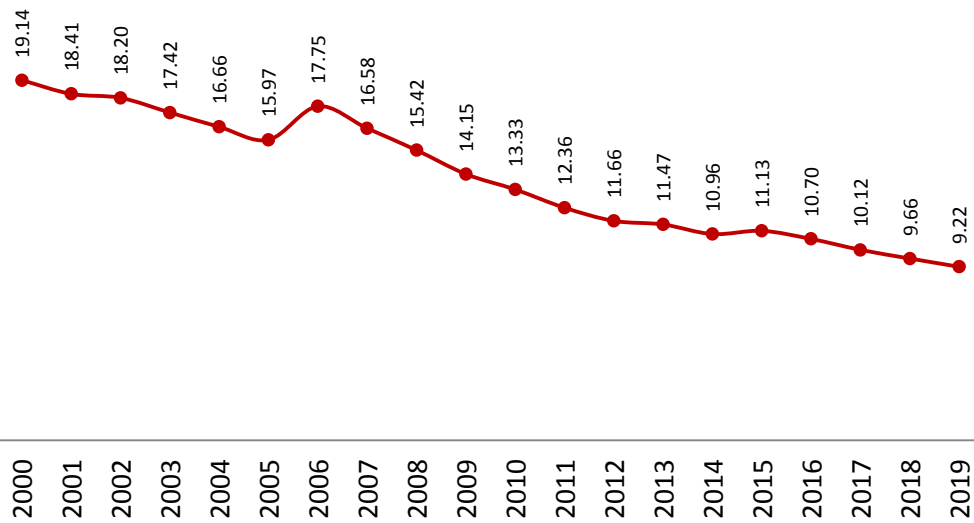
1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang berjalan hingga saat ini merupakan suatu proses berkelanjutan dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat adalah kemiskinan.

Menurut Bank Dunia (2000), kemiskinan merupakan *derivation of well being* atau kondisi hilangnya kesejahteraan. Dewasa ini, kemiskinan masih menjadi permasalahan global, terutama di negara-negara berkembang. Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu hal yang penting dan memperoleh perhatian lebih karena kemiskinan berdampak pada turunnya kualitas hidup masyarakat yang dapat berakibat pada meningkatnya beban sosial-ekonomi, rendahnya produktifitas SDM (sumber daya manusia) dan rendahnya partisipasi masyarakat, serta memburuknya kepercayaan terhadap pemerintah dan menurunnya mutu generasi yang akan datang (Sitepu, 2010). Melihat luasnya dampak kemiskinan, maka dapat dikatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang menyangkut semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya mengenai persoalan rendahnya pendapatan dalam aspek ekonomi, namun juga menyangkut aspek sosial, budaya dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Sehingga pada dasarnya, penanggulangan kemiskinan adalah inti dari permasalahan pembangunan dan tujuan utama dari kebijakan pembangunan di banyak negara (Todaro, 2006).

Di Indonesia sendiri, penurunan angka kemiskinan masih menjadi permasalahan utama dalam proses pembangunan. Kemiskinan di suatu negara merefleksikan tingkat kesejahteraan penduduknya. Semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu negara, maka dapat dikatakan semakin sejahtera penduduknya.

Grafik 1.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia (%)

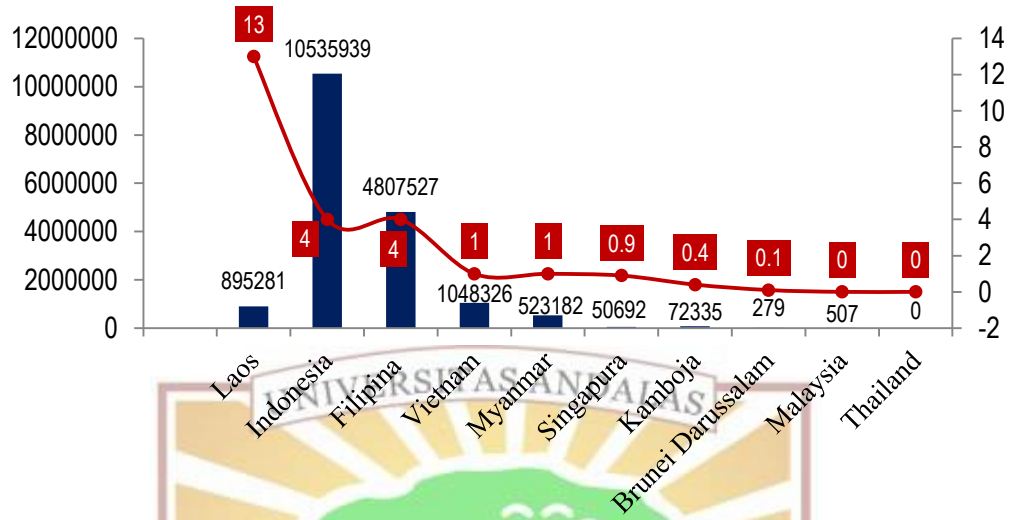


Sumber: Badan Pusat Statistik (2020).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sebagaimana yang ditunjukkan oleh Grafik 1.1, perkembangan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia selama dua puluh tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Namun, selama lima tahun terakhir, penurunannya cenderung mengalami perlambatan dan hingga 2019, tingkat kemiskinan Indonesia masih terbilang tinggi, yaitu 9,2 persen atau 24,78 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi miskin. Jika dibandingkan dengan sesama negara-negara ASEAN, tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi setelah Laos dan menjadi negara dengan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrim terbanyak di ASEAN.

Tabel 1.2. Tingkat Kemiskinan Ekstrim Negara ASEAN Tahun 2019

■ Jumlah Penduduk dalam Kemiskinan Ekstrim —●— Tingkat Kemiskinan Ekstrim (%)



Sumber: World Poverty Clock (2020).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dimana tidak hanya karena *lack of income and asset* (kekurangan pendapatan dan harta), tetapi juga karena faktor *non-income*, salah satunya karena kurangnya akses terhadap layanan publik dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan dan pasar yang lebih luas.

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, sehingga sudah semestinya pemerintah selaku penyelenggara negara berkewajiban mendukung masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, salah satunya melalui penyelesaian masalah kemiskinan. Di Indonesia, kemiskinan sering kali dijadikan agenda utama pemerintahan dari masa ke masa. Perhatian dan komitmen pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia terlihat dari dijalankannya berbagai kebijakan dan program yang pada dasarnya bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin adalah melalui pemerataan pembangunan infrastruktur.

Ketersediaan infrastruktur sudah lama dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam proses pembangunan guna mendorong pertumbuhan dan

mengetaskan kemiskinan, baik dalam bidang kebijakan maupun dalam bidang akademis. Telah banyak upaya yang dikerahkan peneliti dalam mengevaluasi peran infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, baik secara teoritis maupun empiris. Meskipun literatur-literatur yang membahas topik tersebut masih belum sampai pada kata sepakat, namun secara umum terdapat suatu konsensus bahwa dalam kondisi yang tepat, pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan melaluinya berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang.

Tingginya angka kemiskinan sering kali dikaitkan dengan kurang memadainya infrastruktur di beberapa wilayah di Indonesia, sementara ketersediaan infrastruktur memainkan peran penting dalam kegiatan sosial ekonomi. Menurut Houghton dan Khandker (2009), kemudahan akses infrastruktur dasar seperti jalan raya, listrik, air minum dan fasilitas layanan dasar lainnya seperti sekolah dan rumah sakit memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap jalan raya, kesempatannya untuk memasuki pasar akan lebih luas dan peluangnya untuk memperoleh pendapatan yang lebih layak akan semakin besar. Begitu juga dengan akses terhadap sanitasi layak yang berpengaruh pada kondisi kesehatan dan berimplikasi pada peningkatan kualitas manusia. Ketersediaan infrastruktur berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan prakondisi penting dalam penanggulangan kemiskinan (Priyarsono, 2012). Sebaliknya, pembangunan infrastruktur yang lambat dapat menjadi halangan bagi pembangunan dan pertumbuhan secara keseluruhan (Asian Development Bank, 2012). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan infrastruktur berperan dalam penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di era pemerintahan Presiden Jokowi, isu kemiskinan menjadi salah satu fokus pemerintah. Salah satu kebijakan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan cakupan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, listrik, dan

jalan bagi masyarakat kurang mampu. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas, hal ini terlihat dari direalisasikannya berbagai proyek pembangunan infrastruktur guna mendorong pemerataan dan ekspansi ekonomi lebih lanjut. Namun, apakah pembangunan tersebut sudah tepat dan berperan dalam menurunkan angka penduduk miskin di Indonesia? Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan melakukan analisis guna melihat bagaimana pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih di Indonesia karena terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kondisinya yang belum terbilang baik. Sebagai salah satu kebijakan yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan dan perluasan ketersediaan infrastruktur diharapkan dapat berkontribusi dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk melihat lebih lanjut pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan di Indonesia, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan terhadap kemiskinan di Indonesia?
- b. Bagaimana pengaruh infrastruktur listrik terhadap kemiskinan di Indonesia?
- c. Bagaimana pengaruh infrastruktur sanitasi terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.3. Tujuan Umum Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan di Indonesia.